

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk mendukung pertahanan perekonomian melalui penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu upaya purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan tujuan dapat mandiri setelah kembali ke Indonesia melalui edukasi keuangan Pekerja Migran dan keluarganya, pelatihan kewirausahaan Pekerja Migran dan keluarganya, fasilitas setra usaha Pekerja Migran Indonesia, fasilitas pengembangan dan pembinaan usaha Pekerja Migran Indonesia (Mediana *et.al.* 2023).

Warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) tidak semata-mata dapat menyelesaikan masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Menurut penelitian Munawaroh (2019) Pekerja migran Indonesia (PMI) sebagian besar memilih bekerja di luar negeri untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam jangka pendek bekerja sebagai PMI dapat membantu perekonomian keluarga sehari-hari, namun apabila dilihat dalam jangka panjang akan sulit untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarga tanpa perencanaan dan pengolahan keuangan yang matang. PMI purna merupakan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang telah mengakhiri kontrak kerja. PMI yang telah kembali dari bekerja di luar negeri membawa remitansi yang sangat besar. Hal ini pentingnya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap permasalahan yang sering dialami oleh PMI Purna.

Berdasarkan penelitian Ismiranty (2020) kesempatan bekerja di Indonesia yang terbatas memunculkan pandangan bahwa bekerja di luar negeri akan memberikan upah dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun masalah yang sering dihadapi oleh pekerja migran Indonesia (PMI) yaitu kurangnya pemahaman tentang keuangan sehingga PMI yang telah berakhir kontrak kerja dan kembali ke Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dalam jangka panjang, sehingga perlu adanya pembinaan terhadap PMI purna oleh BP2MI.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga pekerja migran Indonesia, maka dibentuklah oleh pemerintah Indonesia lembaga BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. BP2MI memiliki program yang bertujuan agar PMI dan keluarga tidak lagi terjebak dalam permasalahan pemenuhan kebutuhan hidup yang berulang. Program pemberdayaan PMI purna ini diharapkan mampu mengubah nasib mereka dalam pengolahan keuangan yang baik dan jiwa wirausaha yang terampil. Program pemberdayaan yang dilakukan BP2MI (divisi pemberdayaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia) mengajak PMI purna untuk mengolah dan memanfaatkan yang diperoleh dari hasil bekerja di luar negeri.

Pemberdayaan masyarakat terus berada dalam kehidupan selama masyarakat mau berusaha memberdayakan dirinya. pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk pembangunan yang direncanakan sesuai dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh BP2MI terhadap PMI purna diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan penelitian Hartanto *et. al* (2022) angka keputusasaan PMI asal provinsi DIY tahun 2021 sebanyak 3.120 sehingga menjadi perhatian bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI DIY dalam melaksanakan program pemberdayaan bagi PMI purna. BP2MI memberikan dorongan untuk memberdayakan melalui usaha pemberdayaan usaha melalui upaya pembinaan dan pemberdayaan. Oleh karena itu BP2MI melalui berbagai program antara lain program bimbingan usaha, pengembangan usaha, dan pendampingan. Program pemberdayaan ini diharapkan dapat mengubah PMI yang kurang menuju berdaya dan memunculkan inovasi dalam bidang wirausaha.

Pemberdayaan yang diberikan oleh BP2MI Yogyakarta terhadap PMI purna dengan memberikan pelatihan melalui program Pemberdayaan PMI Purna. Budidaya Jamur merupakan salah satu bentuk pelatihan yang diberikan oleh UPT BP2MI Yogyakarta terhadap PMI Purna. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada

tahun 2017 yang bertempat di Galaxy Hotel, Jalan Sambisari, Kalasan, Sleman, DI Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul program pemberdayaan bagi PMI purna oleh BP2MI Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana proses dan apa saja faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan pemberdayaan budidaya jamur oleh BP2MI Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan PMI Purna program budidaya jamur oleh BP2MI Yogyakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan budidaya jamur oleh BP2MI Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh BP2MI kepada PMI Purna
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan PMI Purna oleh BP2MI

1.4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah suatu kegiatan membaca serta menelusuri referensi penelitian yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti. Tinjauan Pustaka dapat berfungsi sebagai bahan acuan dalam suatu kegiatan penelitian. Peneliti menggunakan beberapa tinjauan yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian oleh Eka Sapta Surya (2022) yang berjudul, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Ikan Nila di Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang”. Persamaan penelitian ini dengan proposal penelitian penulis adalah mengenai pemberdayaan dengan program

budidaya. Beberapa hal yang penulis kutip dari studi terdahulu adalah program pemberdayaan ini dilaksanakan oleh kelurahan Balankrajan berupa pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan nila. Program pemberdayaan ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di tengah pandemi covid-19. Meskipun program pemberdayaan ini berjalan dengan baik, namun pelaksanaannya belum dapat dikatakan sepenuhnya lancar karena masih adanya beberapa hambatan salah satunya ialah adanya rasa keraguan oleh pelaku budidaya karena jumlah hasil panen yang belum maksimal dikarenakan belum adanya jadwal teratur untuk pelaksanaan pembibitan dan proses panen ikan yang teratur kemudian, ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai dan perlunya pengembangan kualitas sumber daya manusia. Perbedaan penelitian tersebut dengan proposal penelitian penulis adalah mengenai subyek yang diberdayakan yaitu masyarakat Kelurahan Bakalankrajan Kota Malang sedangkan subjek penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu PMI Purna dan yang memberdayakan adalah UPT BP2MI Yogyakarta.

Kedua, penelitian oleh Arifia Anindita, Achmad Taufiq (2020) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budidaya Dalam Mengembangkan Kampung Lele di Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali”. Persamaan penelitian ini dengan proposal penelitian penulis adalah mengenai pemberdayaan dengan program budidaya. Beberapa hal yang penulis kutip dari penelitian terdahulu tersebut adalah program pemberdayaan ini dilaksanakan oleh Kelompok Karya Mina dan sub Kelompok Pengolahan Karmina berupa pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan lele. Program pemberdayaan masyarakat ini bisa dikatakan berjalan dengan baik karena seluruh masyarakat Kampung Lele Desa Tegalrejo, ikut berpartisipasi sehingga tercipta kebersamaan dan kerukunan yang sangat kompak demi mencapai tujuan bersama. Namun, dari terlaksananya program pemberdayaan tersebut tidak lepas dari faktor penghambat yaitu belum terpenuhi pasokan benih lele lokal sehingga masyarakat mengambil pasokan benih lele dari luar daerah demi memenuhi permintaan pasar. Perbedaan penelitian tersebut dengan proposal penelitian penulis salah satunya adalah pada subyek yang diberdayakan yaitu masyarakat Kampung Lele, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit,

Kabupaten Boyolali, sedangkan subyek penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu PMI purna dan yang memberdayakan adalah UPT BP2MI Yogyakarta.

Ketiga, penelitian oleh Zulfa Nuraini. (2018) yang berjudul, “Praktik Sosial Pemberdayaan PMI Purna (Studi Kasus Perkumpulan PMI Purna dan Keluarga di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar)”. Persamaan penelitian ini dengan proposal penelitian penulis adalah mengenai subyek yang diberdayakan yaitu PMI Purna. Beberapa hal yang penulis kutip dari penelitian terdahulu tersebut adalah program pemberdayaan di Kecamatan Nglegok ini dilaksanakan oleh Pertakina kepada PMI Purna. Pertakina merupakan organisasi yang beranggotakan mantan PMI dan keluarga PMI. Organisasi ini bergerak pada sektor pemberdayaan PMI. Program pemberdayaan ini diharapkan mampu memandirikan PMI dengan mengasah potensi yang dimiliki sehingga PMI tersebut dapat memanfaatkan uang yang didapat pada saat kerja diluar negeri menjadi usaha produktif di dalam negeri. Program pemberdayaan ini dapat dikatakan berjalan baik namun, tidak lepas dari permasalahan yaitu belum adanya dukungan penuh dari pemerintah sehingga, organisasi ini kerap kali terkendala masalah keuangan pada saat melaksanakan program kerjanya. Perbedaan penelitian tersebut dengan proposal penelitian penulis adalah mengenai subyek yang memberdayakan. Subyek yang memberdayakan pada proposal penelitian penulis yaitu BP2MI.

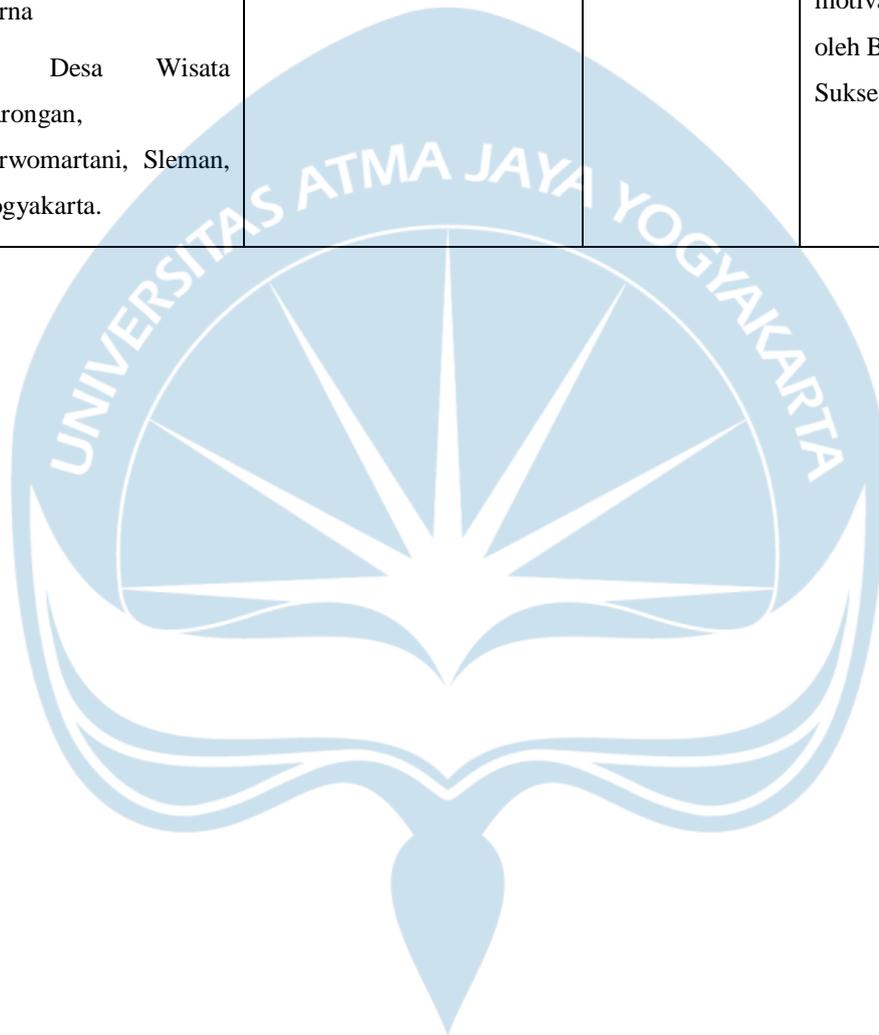
Keempat, penelitian oleh Maria Claudia (2022) yang berjudul, “Proses Pemberdayaan BP2MI DIY Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Di Desa Wisata Garongan, Purwomartani, Sleman, Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan proposal penelitian penulis adalah pembahasan mengenai proses pemberdayaan dan subjek pemberdayaan yang dilakukan oleh UPT BP2MI Yogyakarta. Beberapa hal yang penulis kutip dari penelitian terdahulu tersebut adalah program pemberdayaan DESWITA Garongan sudah berjalan dengan baik yang didukung oleh fasilitas dan pemberian motivasi yang diberikan oleh BP2MI dan PMI Purna Sukses. Kemudian, dalam mengatasi hambatan keterbatasan dana untuk melaksanakan program pemberdayaan ini, BP2MI DIY mempunyai solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara, pengumpulan swadana dari PMI Purna sendiri, melakukan Kerjasama dengan beberapa instansi dan melakukan

Kerjasama dengan pihak Bank sebagai pemodal. Perbedaan penelitian tersebut dengan proposal penelitian penulis adalah mengenai topik pemberdayaan. Topik penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terdahulu adalah pemberdayaan Desa Wisata Garongan, Sedangkan, topik yang dipilih oleh penulis adalah mengenai pemberdayaan dalam bentuk pelatihan budidaya jamur.



Penulis Tahun Judul	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Eka Sapta Surya (2022) “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Ikan Nila di Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang”	Keraguan pelaku budidaya karena jumlah hasil panen yang belum maksimal dikarenakan belum adanya jadwal teratur untuk pelaksanaan pembibitan dan proses panen ikan yang teratur kemudian, ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai dan perlunya pengembangan kualitas sumber daya manusia.	Kualitatif Deskriptif	Masyarakat kelurahan Bakalankrajan, sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan tersebut karena bermanfaat untuk dapat mendorong perekonomian masyarakat di tengah pandemi covid-19
Arifia Anindita, Achmad Taufiq. (2020). “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budidaya Dalam Mengembangkan Kampung Lele di Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali”	Belum ada inisiatif dari kelompok pembudidaya dan pengolahan untuk membentuk Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Kemudian, belum terpenuhinya pasokan benih lele lokal kabupaten Boyolali	Kualitatif Deskriptif	Pembudidaya ikan lele berbasis teknologi bioflok mendapat manfaat dalam membudidayakan ikan lele yaitu peningkatan produksi, pemanfaatan lahan sempit dan mengurangi bau.
Zulfa Nuraini. (2018). “Praktik Sosial Pemberdayaan PMI Purna (Studi Kasus Perkumpulan PMI Purna dan Keluarga di Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar).”	Belum adanya dukungan penuh dari pemerintah sehingga, organisasi ini kerap kali terkendala masalah keuangan pada saat melaksanakan program kerjanya.	Kualitatif Deskriptif	Pembudidaya ikan lele berbasis teknologi bioflok mendapat manfaat dalam membudidayakan ikan lele yaitu peningkatan produksi, pemanfaatan lahan sempit dan mengurangi bau.

<p>Maria Claudia.(2022). Proses Pemberdayaan BP2MI DIY Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Di Desa Wisata Garongan, Purwomartani, Sleman, Yogyakarta.</p>	<p>BP2MI DIY mengalami keterbatasan anggaran dana dari pusat untuk melaksanakan program pemberdayaan ini.</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Program pemberdayaan DESWITA Garongan sudah berjalan dengan baik yang didukung oleh fasilitas dan pemberian motivasi yang diberikan oleh BP2MI dan PMI Purna Sukses.</p>
---	---	----------------------------------	---



1.5. Kerangka Konseptual

1. Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna

PMI purna merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu atau setelah selesainya kontrak perjanjian kontrak kerja dengan menerima upah sesuai ketentuan masing – masing negara tujuan yang sudah menyelesaikan masa kerjanya.

Undang - Undang Nomor 18 pasal 7 Tahun 2017 mengatur perlindungan bagi CPMI maupun PMI Purna. Contoh perlindungan yang diberikan bagi PMI purna salah satunya adalah melalui program pemberdayaan. Dalam Undang – Undang Nomor 18 pada pasal 47 huruf (f) Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dimana disebutkan bahwa Kepala Badan sebagai pelaksana kebijakan bertugas untuk memberikan pemberdayaan sosial dan ekonomi kepada Pekerja Migran Indonesia.

BP2MI merupakan sebagai instansi yang menaungi PMI telah menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan terhadap PMI purna di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Indonesia, salah satunya terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perpanjangan tangan dari BP2MI.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan selama ini berkembang nyata di kehidupan masyarakat pada pihak yang lemah. Masyarakat yang lemah ini cenderung mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan hingga kemiskinan. Hal tersebut lah sangat memerlukan perubahan agar dapat membangun kepercayaan diri menjadi lebih berdaya. Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama maupun budaya.

Menurut Jim Ife (1995:182) pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, berpartisipasi dalam menentukan masa depannya serta dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Tujuan pemberdayaan yaitu membentuk masyarakat untuk mampu berdaya, berdaya saing, dan menjadi masyarakat yang mandiri dalam memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan serta dapat berpartisipasi dalam mencapai hidup yang lebih baik. Menurut Suharto (2005:60) tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu membentuk masyarakat berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik dalam fisik, ekonomi, dan sosial seperti percaya diri dalam menyampaikan apresiasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri.

a. Tahap- tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap dan tidak bisa dilakukan secara instan. Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai mencapai target masyarakat mampu untuk mandiri. Adapun tahap-tahap pemberdayaan menurut Sriyana (2021) yaitu sebagai berikut :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Pembentukan kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan, adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan dan kecakapan keterampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang akan mengarahkan pada kemandirian.

Tahap pertama yaitu tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan menjadi sejahtera. Penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat dengan kondisi saat itu, dengan demikian

dapat merangsang akan perlu memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan begitu masyarakat akan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi saat itu.

Tahap kedua yaitu tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan terampil. Dengan adanya pengetahuan dan kecakapan keterampilan maka masyarakat akan mendapatkan kemampuan dan keterampilan yang memiliki nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan sampai keterampilan dasar yang mereka butuhkan.

Tahap ketiga yaitu peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan mengarahkan masyarakat untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan keterampilan yang akan mengarahkan pada kemandirian. Kemandirian itu akan membuat masyarakat lebih inisiatif, inovasi dan melahirkan kreasi - kreasi baru.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Berkaitan dengan proses di dalam pemberdayaan ini terdapat faktor pendukung, beberapa pendapat dari para ahli yang dapat penulis telusuri adalah Hamzah B. Uno (2007) dan Soekidjo Notoatmodjo (2003).

1. Motivasi

Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, pengharapan dan penghormatan. Motivasi adalah sesuatu apa yang membuat seseorang bertindak. (Hamzah B. Uno, 2007).

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan – kebijakan pemerintah, yang dikeluarkan melalui undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat

keputusan menteri dan pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia. (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:9-12).

Proses kegiatan pemberdayaan masyarakat ini juga terdapat faktor penghambat. Berikut beberapa pendapat dari para ahli yang dapat penulis telusuri adalah Munandar (2011) dan Soepartono (2006).

1. Anggaran

Menurut Munandar (2011) adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

2. Sarana dan Prasarana

Menurut Soepartono (2006:4) yang dimaksud dengan sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana kegiatan masyarakat dalam pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari rendahnya sumber daya manusia itu, hal ini karena masyarakat di desa sangatlah sederhana dan belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan keinginan masyarakat.